

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan politik merupakan suatu konsep yang penting dalam sistem sosial politik suatu negara. Pendidikan politik adalah komponen yang sangat penting dalam upaya memperkuat sistem demokrasi suatu negara. Pendidikan politik memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak dan kewajiban politik mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses politik. Masyarakat yang teredukasi dengan baik dalam bidang politik akan memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan demokrasi, baik dalam memilih wakil rakyat maupun dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik lainnya. Oleh karena itu, pendidikan politik menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Makna pendidikan politik lebih luas dari itu. Selain itu Pendidikan politik juga dapat di katakan sebagai suatu cara mempertahankan keadaan yang relatif stabil di keadaan tertentu sehingga dapat di gunakan sebagai dasar bagi proses demokrasi.¹

Pemahaman politik atau pemahaman aspek – aspek politis dari setiap permasalahan Memiliki persamaan dimana Pemahaman politik berarti pemahaman konflik. Disisi lain Pendidikan politik merupakan proses memperngaruhi individu warga negara untuk dapat memperoleh informasi, wawasan, dan keterampilan politik yang memadai, sehingga memiliki kemampuan berfikir yang kritis guna melawan situasi dan kondisi yang tidak wajar.

¹ Dr Eko Handoyo dan Puji Lestari, “*Pendidikan Politik*”. Yogyakarta : Pohon Cahaya. 2017. Hlm 11 - 12

Adapun beberapa Fungsi dari adanya Pendidikan politik adalah :

1. Mengubah dan Membentuk Perilaku: Guna untuk mengubah dan membentuk perilaku individu agar sesuai dengan tujuan politik yang mampu menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab.
2. Pemahaman dan Penghayatan Nilai Politik: Pendidikan politik bertujuan untuk pemahaman masyarakat tentang politik, nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap ideal dan baik.
3. Partisipasi Politik yang Bertanggung Jawab: fungsi pendidikan politik juga melibatkan pembentukan partisipasi politik yang bertanggung jawab, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam kehidupan politik negara.
4. Proses Dialog: Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog baik di lingkungan sekolah, pemerintah, maupun partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma, dan simbol politik.²

Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Menurut Soeharto, tujuan pendidikan politik adalah membentuk kepribadian politik, kesadaran politik, dan partisipasi politik pada diri warga negara.

² Yudin Citriadin *Pengantar Pendidikan* Tahun 2019, hlm.1.

Adapun tujuan pendidikan politik menurut Kartono adalah :

Membuat rakyat mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik, berani memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang kurang baik, aktifitasnya diarahkan pada proses demokrasi sejati, dan sanggup memperjuangkan kepentingan serta ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Kemudian, memperhatikan peran masing-masing dari setiap individu sebagai warganegara, mengembangkan semua bakat dan kemampuannya seperti pengetahuan, wawasan, sikap, dan ketrampilan. Agar dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan bangsa dan negara.³

Inti dari pendidikan politik adalah pemahaman politik atau pemahanan aspek-aspek politik dari setiap permasalahan. Pemahaman politik berarti pemahaman konflik.. Banyaknya konflik dalam masyarakat disebabkan oleh adanya kontroversi, perbedaan pikiran, sikap, tindakan, dan kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajar jika di masyarakat muncul persaingan, ketegangan, dan konflik. Dalam perspektif konflik, hidup bermasyarakat merupakan hidup di tengah ketegangan dan konflik. Politik dalam konteks ini adalah memengaruhi dan ikut mengambil keputusan di tengah medan politik dan pertarungan konflik tersebut.

Dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik pasal 31 mengatakan bahwa partai politik melakukan Pendidikan politik bagi masyarakat sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya dengan tujuan meningkatkan kesadaran

³ *Ibid, hlm.16.*

hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat diperlukan agar mereka dapat menentukan pilihan politiknya secara cerdas dan untuk menjamin kualitas hasil pemilu. Dalam konteks pranata masyarakat mempresentasikan kepentingannya, memilih dan dipilih adalah hak asasi bagi manusia, untuk itu partai politik adalah salah satu pilar demokrasi yang idealnya memberikan Pendidikan politik dan pencerahan kepada rakyat sebagai konstituennya.⁴ Partai politik adalah salah satu pendukung dari suksesnya negara demokrasi. Partai politik akan mampu menjalankan perannya dengan efektif apabila ada tanggung jawab bersama antara partai politik itu sendiri dengan masyarakat luas.

Partai politik di Indonesia memiliki 5 fungsi yaitu :

1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
3. Sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan negara
4. Sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia

⁴ Marselina Kareth, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Kampung (Suatu Studi di Desa Karetubun Distrik Ayamaru Utara Kabupaten Maybrat)* Tahun 2016.skripsi.

5. Sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.⁵

Salah satu fungsi dari partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara atau masyarakat. Partai politik berperan dalam melakukan pendidikan politik sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun bentuk dari penyelenggaraan pendidikan politik masyarakat adalah dengan melakukan sosialisasi politik, kampanye, ataupun melalui kaderisasi partai. Dalam hal ini tentunya harus ada sinergis antara partai politik itu sendiri dengan masyarakat sebagai objek dan subjek penyelenggara.

Partai PDI-P merupakan salah satu partai yang telah lama eksis dalam percaturan politik nasional. Partai ini juga telah mengalami banyak perubahan dalam berbagai hal, tidak terkecuali dalam rangka memantapkan keberadaan peran dan fungsi PDI-P ditengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu pendidikan politik tentunya menjadi agenda yang wajib dilakukan oleh partai tentunya tidak lepas dari kewajiban partai PDI-P.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan pesertanya adalah pengurus partai tingkat DPC, PAC, Sayap sayap partai, badan badan partai, kader kader partai yang telah mengikuti Pendidikan kader tingkat pratama dan sampailah pada kader tingkat kecamatan dan kelurahan yang terdaftar dalam kepengurusan badan dan sayap partai. tidak dengan masyarakat awam atau masyarakat biasa. Mengingat masyarakat sangat perlu mendapatkan Pendidikan politik dimana Pendidikan politik di kota jambi masih sangat minim, dari sosialisasi

⁵ *Ibid*, hlm.98.

pemilih pemula yang belum dilakukan, kemudian pemilih tua yang masih banyak merasa kebingungan melihat surat suara yang banyak ketika pemilu, kemudian para caleg kurang di edukasi mengenai bahayanya *black campaign* (kampanye hitam) bahkan masyarakat banyak yang tidak tau apa itu *black campaign*. Oleh karena itu, Partai politik, sebagai salah satu pilar demokrasi, memegang peranan penting dalam melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai salah satu partai besar di Indonesia, memiliki kewajiban untuk mengedukasi kader dan masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi, hak dan kewajiban politik, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Di Kota Jambi, PDI Perjuangan sebagai salah satu kekuatan politik lokal, juga diharapkan berperan dalam memberikan pendidikan politik yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan kualitas demokrasi.

Di Kota Jambi pendidikan politik sangat minim sehingga peran partai dalam memberikan pengetahuan politik sangatlah penting. Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia merupakan partai tertua sekaligus partai pemegang kekuasaan selama 2 periode, partai yang dapat dinilai sebagai partai yang memiliki nilai politik yang tinggi, dan tingkat pendidikan pengurus partai yang bagus. Mengingat, Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan pendidikan politik bagi warga negara. Sehingga Pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik tetapi juga bagi para pemilih yang sudah

memiliki pengetahuan tentang persoalan politik. Hal ini dikarenakan sikap apatis terhadap kegiatan politik dimungkinkan muncul dari kalangan masyarakat yang memiliki pengetahuan politik, dikarenakan adanya kekecewaan serta frustrasi terhadap sistem politik yang ada, sehingga memunculkan kalangan masyarakat yang apatis dan bahkan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dengan menjadi golput (golongan putih). Hal ini menjadikan pentingnya pendidikan politik (political education) bagi rakyat. Dengan kata lain pendidikan politik memiliki makna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga Negara (pemilih) untuk memiliki pengetahuan politik yang memadai.⁶ Karena jika masyarakat biasa atau masyarakat awam tidak mengetahui fungsi dari Pendidikan politik, maka akan berdampak pada partisipasi masyarakat yang rendah, sikap apatis dalam memberikan kontribusinya terhadap kebijakan pemerintah, sehingga hal ini sangat dikhawatirkan karena dapat membentuk situasi kebijakan yang berjalan satu arah.

Akibat dari tidak adanya Pendidikan politik di masyarakat ternyata menimbulkan berbagai fenomena di masyarakat yaitu menjadi minimnya pengetahuan. selain itu penghayatan dan pemahaman politik seperti yang dijelaskan pada fungsi Pendidikan politik menjadi suatu hal yang tidak diketahui masyarakat. Oleh karena pengetahuan masyarakat tentang pentingnya Pendidikan politik mengakibatkan partisipasi masyarakat mengenai politik bebas dan aman sangat minim karena hanya mempertimbangkan keuntungan secara pribadi tanpa mempertimbangkan tatanan demokrasi demi menciptakan politik aman.

⁶ *Ibid.*

Fenomena selanjutnya yang terjadi di masyarakat menurut informasi dari salah seorang anggota partai yaitu adanya kekeliruan dari isu yang di ciptakan media sosial dengan mengadakan pengalihan isu tentang suatu peristiwa perpolitikan sehingga mempengaruhi masyarakat dari segi politik baik politik ekonomi, politik keamanan dan politik pertahanan negara. Masyarakat kurang mencerna secara baik. Sementara keresahan dan ketentraman menjadi suatu kelemahan di masyarakat. Dengan kata lain masyarakat tidak bisa mencerna dan mengkaji ulang mengenai permasalahan yang sehingga mengakibatkan masyarakat tidak dapat membedakan fiktif karangan atau fakta. Dan ini tentunya menjadi permasalahan di tengah masyarakat.

pelaksanaan pendidikan politik oleh PDI Perjuangan di Kota Jambi belum banyak dikaji secara mendalam. Meskipun PDI Perjuangan dikenal aktif dalam dunia politik, implementasi pendidikan politik di tingkat lokal masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana program-program pendidikan politik yang dijalankan dapat mencapai tujuannya. Beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini antara lain: Bagaimana PDI Perjuangan melaksanakan fungsi pendidikan politik di Kota Jambi? Apa saja bentuk program pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh partai ini, dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesadaran serta partisipasi politik masyarakat setempat? Apa saja tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, serta strategi apa yang digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul? Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran PDI Perjuangan dalam menjalankan fungsi pendidikan politik di Kota Jambi, sekaligus

memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk pengembangan program pendidikan politik yang lebih efektif di masa depan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadhel Muhammad yang berjudul “Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024”. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori strategi Chandler, Formasi sasaran dan jangka Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Selatan telah mengimplementasikan berbagai strategi pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula. Strategi tersebut melibatkan pemanfaatan media sosial, penyelenggaraan sosialisasi di sekolah-sekolah, kampanye pendidikan pemilih, dan program-program pelatihan keterampilan berpartisipasi dalam proses demokratis.⁷ Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki fokus yang sama yaitu pendidikan politik. Namun tetap memiliki perbedaan dalam penelitiannya karena pada penelitian terdahulu menggunakan teori strategi, sedangkan penelitian ini menggunakan teori partai politik dan pendidikan politik.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aprillio Poppy Belladonna yang berjudul “Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Masyarakat”. Menjelaskan bahwa Pendidikan politik masyarakat sekarang ini masih sangat minim, dapat dilihat dari sikap partisipasi masyarakat yang masih sangat pasif. Metode dalam penelitian ini menggunakan

⁷ Fadhel Muhammad, *Strategi Pendidikan Politik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Umum Tahun 2024*

pendekatan kualitatif dengan penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, belum maksimal dirasakan, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami benar mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan berperan aktif dalam dunia politik, melalui program yang dilaksanakan oleh partai dalam memberikan pendidikan politik banyak menghadapi kendala dimulai dari objeknya sendiri yaitu masyarakat.⁸ Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki persamaan di fokus penelitiannya, yaitu sama sama membahas bagaimana fungsi partai politik dalam memberikan pendidikan politik pada masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena pendidikan politik merupakan salah satu fungsi utama yang harus dijalankan oleh partai politik untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Meskipun PDIP sebagai partai politik memiliki peran strategis dalam melaksanakan pendidikan politik, masih terbatas informasi mengenai bagaimana pendidikan politik dilaksanakan di Kota Jambi mengindikasikan bahwa penelitian ini sangat relevan. Berdasarkan permasalahan yang sudah di uraikan maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi.”** Yang di harapkan dapat memberikan pengetahuan mendalam mengenai pentingnya pendidikan politik melihat banyaknya fenomena permasalahan yang ada. Selain itu, penelitian ini di

⁸ Aprillio Poppy Belladonna, *Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Masyarakat Tahun 2019.*

harapkan dapat memberikan solusi melalui analisis dari hasil penelitian yang dijabarkan dengan maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah ini bertujuan untuk menegaskan kembali masalah yang akan dikaji, sehingga penyelesaian masalah bisa ditentukan dengan tepat dan mendapat tujuan dari penelitian. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba mengemukakan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik di Kota Jambi
2. Apa yang menjadi kendala DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pelaksanaan fungsi pendidikan politik di Kota Jambi

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai target yang di inginkan sehingga, dapat memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana DPC PDI-P Kota Jambi dalam menjalankan fungsinya sebagai media pendidikan politik untuk seluruh masyarakat Kota Jambi serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja kendala PDI-P dalam pelaksanaan fungsi pendidikan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar nantinya diharapkan dapat memberi umpan balik atau manfaat kepada berbagai pihak. Penelitian ini bermfaat untuk :

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai pembanding bagi pihak yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan fungsi Pendidikan politik oleh partai.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini yang pertama diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kemampuan partai dalam melakukan Pendidikan politik bagi pengurus, kader, simpatisan, bahkan masyarakat umum. Kedua, bagi masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan mengenai sistem politik, sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

1.5 Landasan Teori

1. Pendidikan Politik

Pengertian pendidikan politik bukan hanya penggabungan dari kata pendidikan dan politik, makna dari pendidikan politik sangat luas. Pendidikan politik didefinisikan sebagai pendidikan orang dewasa, yang diarahkan untuk membina kemampuan seorang individu untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi yang bebas dan mengembangkan kedudukannya sebagai warga negara. Pendidikan merupakan suatu proses yang mengajarkan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, serta simbol-simbol politik yang salah satunya

melalui peran partai politik. Proses pendidikan politik dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan kepemimpinan, sosialisasi politik, diskusi, seminar, serta keikutsertaan dalam forum pertemuan. Selain itu pendidikan politik juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana cara berpolitik yang sehat dan mendidik masyarakat untuk mematuhi aturan.

Gabriel Almond menjelaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik yang bertujuan untuk membentuk nilai politik masyarakat agar mereka berpartisipasi politik di dalamnya.⁹ Kemudian M. Nur Khoiron juga menyatakan bahwa Pendidikan politik bagi warga negara adalah penyadaran warga negara untuk sampai pada pemahaman politik atau aspek aspek politik dari setiap permasalahan sehingga dapat mempengaruhi dan ikut mengambil keputusan ditengah medan politik dan konflik konflik. pendidikan politik ini dilakukan sebagai upaya edukatif yang sistematis dan intensif untuk memantapkan kesadaran bernegara.¹⁰ tujuan partai politik dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan politik tersebut akan mendorong partisipasi politik dari para kader dan pengurus partai politik, serta masyarakat.

Menurut M Nur Khoiron, pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan tentang politik, tetapi juga berfungsi untuk membentuk sikap

⁹ Ashika Rahman, —Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan!, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor 1, 2018, [Jurnal Online], www.researchgate.net.

¹⁰ M.Nur Khoiron, dkk, *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara (Tawaran Konseptual dan Kerangka Kerja)*, (Yogyakarta: LKiS, 1990), hlm.4.

dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Ia menekankan bahwa pendidikan politik seharusnya dapat mengubah pola pikir individu agar lebih peka terhadap isu-isu politik, dan lebih aktif dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Salah satu tujuan utama dari pendidikan politik menurut Khoiron adalah menumbuhkan kesadaran politik di kalangan masyarakat, baik itu kader partai politik, anggota organisasi, maupun masyarakat umum. Kesadaran politik ini mencakup pemahaman terhadap hak-hak politik yang dimiliki individu, serta peran mereka dalam sistem politik yang ada. Pendidikan politik juga bertujuan untuk mendorong partisipasi politik aktif dari masyarakat. Partisipasi ini bisa dalam berbagai bentuk, baik itu melalui pemilu, kegiatan partai, maupun aksi politik lainnya. Khoiron menganggap bahwa partisipasi aktif dalam politik adalah salah satu cara untuk menguatkan demokrasi, karena dengan adanya partisipasi politik, akan tercipta kontrol sosial yang lebih efektif terhadap kekuasaan.

Beberapa bentuk pendidikan politik yang efektif dalam membentuk kesadaran politik dan partisipasi politik, baik dalam konteks internal partai politik maupun masyarakat: pertama, pelatihan kepemimpinan dan kaderisasi. Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan kepemimpinan politik di kalangan kader. Pelatihan ini juga menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan tentang cara-cara berpolitik yang baik, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan organisasi kader. Kedua, sosialisasi ideologi partai. Dalam konteks partai politik, pendidikan politik juga mencakup sosialisasi ideologi partai kepada kader dan anggota partai. Ini bertujuan agar semua anggota partai memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh partai tersebut. Ketiga, diskusi

politik Pendidikan politik dalam bentuk diskusi politik bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analitis kader dan anggota partai dalam menanggapi berbagai isu politik yang berkembang. Forum ini dapat menjadi tempat bagi anggota untuk berbagi ide dan memperkaya wawasan politik mereka. Keempat, seminar dan lokakarya. Seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh partai dapat memperkenalkan kader kepada isu-isu politik terkini, serta memberikan pelatihan praktis mengenai strategi kampanye, teknik berbicara di depan umum, serta penyuluhan tentang cara-cara yang efektif dalam berpolitik.

Kelima, kampanye politik. Kampanye politik menjadi salah satu bentuk pendidikan politik praktis yang memberikan kesempatan bagi kader untuk berlatih terjun langsung dalam dunia politik. Melalui kampanye, kader dapat mempraktikkan keterampilan berorganisasi, berbicara dengan masyarakat, serta menerapkan nilai-nilai ideologi partai dalam aksi nyata. pendidikan politik merupakan proses yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang politik, tetapi juga untuk membentuk kesadaran dan keterampilan politik, serta mendorong partisipasi politik yang aktif di kalangan masyarakat dan kader partai. Bentuk-bentuk pendidikan politik seperti pelatihan kepemimpinan, sosialisasi ideologi, dan kampanye politik memiliki peranan penting dalam membentuk kader yang siap berpartisipasi dalam politik praktis, baik dalam konteks internal partai maupun di tingkat masyarakat.¹¹

¹¹ M Nur Khoiron, pendidikan politik dalam demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 Tentang Partai Politik, dijelaskan tentang tujuan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Partai politik memiliki peran yang penting dalam memajukan dan mencerdaskan masyarakat juga kader partai tentang pentingnya politik. Karena, partai merupakan sebuah organisasi yang bisa berinteraksi ke masyarakat dan kadernya secara langsung. Menurut Kuntowijoyo bentuk Pendidikan politik, adalah

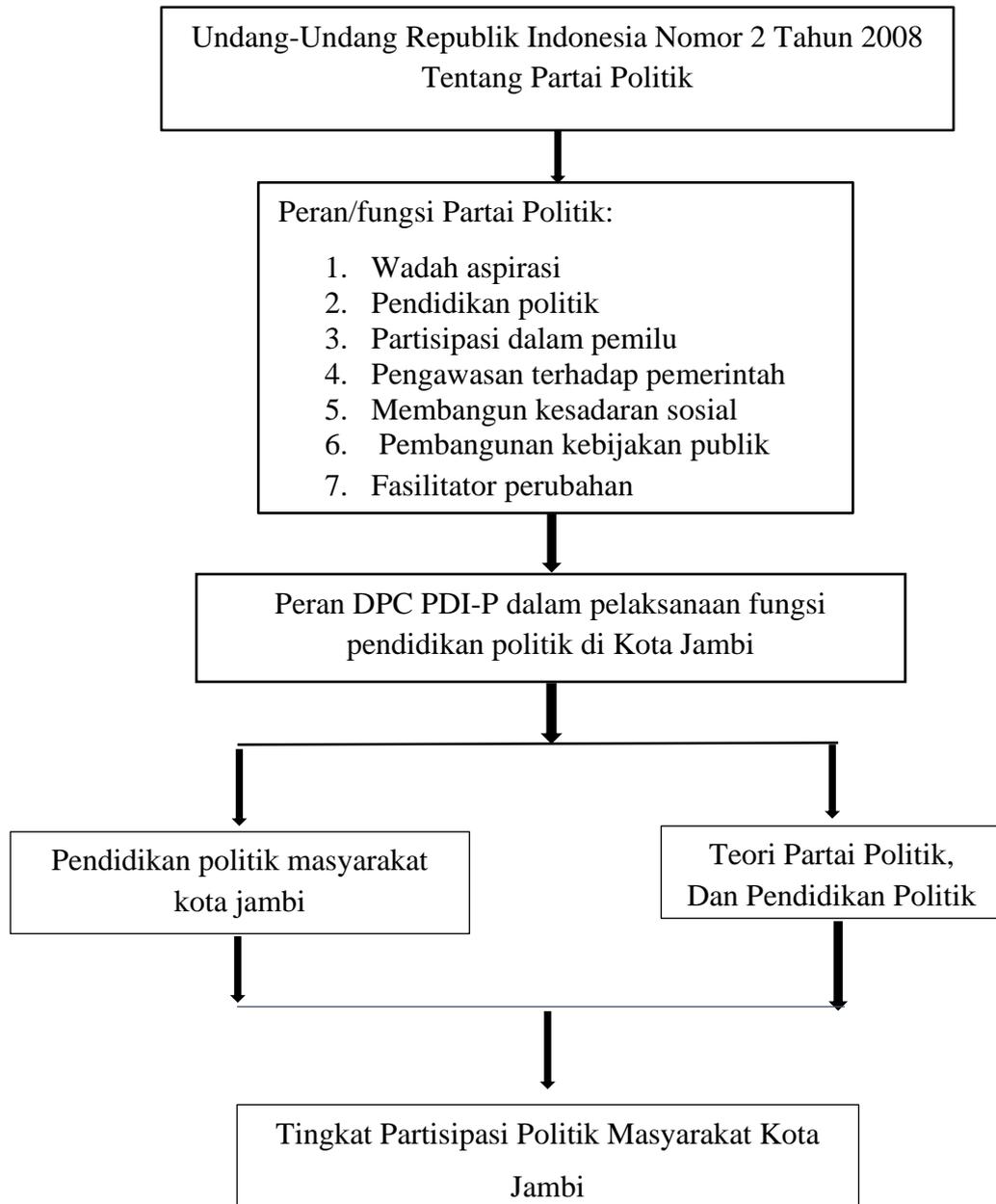
1. Pendidikan politik formal dan
2. Pendidikan politik yang dilakukan secara nonformal.¹²

Dari beberapa definisi di atas dapat diartikan bahwa, pendidikan politik merupakan pendidikan orang dewasa yang bertujuan agar masyarakat bisa menjadi individu yang cerdas pengetahuannya tentang politik dan sadar akan hak berpolitiknya kemudian pendidikan politik juga bertujuan agar partai menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk berkontestasi dan memenangkan perjuangan politik partai. Dan Pendidikan menjadi sesuatu yang penting di implementasikan pada

¹² Kuntowijoyo, *Metode Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm.58.

masyarakat guna memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap politik oleh karena itu, teori ini sangat penting digunakan karena dalam indikator penilaian akan mengarahkan penelitian terhadap pentingnya Pendidikan politik.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Untuk memudahkan penulis dalam merancang dan menjelaskan maksud serta tujuan penelitian ini, diperlukan suatu panduan berupa kerangka pikir yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menguraikan permasalahan yang sedang diteliti, seperti kerangka pikir yang telah ditampilkan di atas.

Pada penelitian ini dirujuk dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menjelaskan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Berdasarkan rujukan tersebut, maka penelitian ini mengarah pada Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi guna menghasilkan masyarakat yang sadar politik, aktif dalam proses demokrasi, dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

1.7 Metode Penelitian

Pada hakikatnya, metode penelitian adalah tahapan-tahapan ilmiah yang diterapkan untuk memperoleh informasi untuk mencapai target penelitian atau kebermanfaatan yang telah ditetapkan. Tahapan ilmiah ini bermakna aktivitas penelitian dilaksanakan menurut kriteria-kriteria keilmuan, yakni: empiris, rasional, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilaksanakan dengan berpedoman pada tahapan-tahapan yang logis, sehingga dapat disetujui pembaca.

Sementara itu, empiris bermakna langkah-langkah penelitian tersebut dapat diperhatikan melalui panca indera manusia, sehingga peneliti selanjutnya dapat mengulang kembali langkah tersebut di penelitiannya atau memodifikasinya agar memperoleh penemuan baru. Adapun yang dimaksud dengan sistematis ialah

kegiatan penelitian dilaksanakan melalui tahapan tahapan yang tertata dengan baik dan benar yang bersifat logis¹³.

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai fenomena atau masalah yang ada dilapangan. Dengan metode kualitatif, data yang tidak dapat diolah atau dianalisis dengan prosedur statistik dapat dianalisis lebih mendalam menggunakan metode ini.¹⁴ Sehingga dengan metode ini peneliti dapat menganalisis lebih mendalam terkait Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jambi Provinsi Jambi. Karena penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Pendidikan politik di Kota Jambi yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan, maka objek dalam penelitian ini adalah DPC PDI Perjuangan. Besarnya lingkup dalam penelitian sosial, dan keterbatasan yang dimiliki peneliti untuk meneliti objek penelitian maka Fokus penelitian ini hanya membahas mengenai Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh DPC PDI Perjuangan di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dengan melihat bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta menganalisis

¹³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013. hlm 2.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami penelitian Kualitatif* (Alfabeta, Bandung, 2016), cet. 12, hlm. 2-3

faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Fungsi Pendidikan Politik oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Jambi.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang di peroleh dengan mewawancarai secara langsung dari sumber asli atau informan untuk mendapatkan data atau informasi secara faktual. Sumber data primer di dalam penelitian ini merupakan informan yang menguasai dan memahami mengenai Pendidikan politik.¹⁵

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang bersumber dari catatan, buku atau majalah yang datanya sudah diolah. Dapat dipahami, bahwa data ini diperoleh dari tangan kedua, sehingga peneliti langsung dapat memperoleh informasi dari data yang disajikan dan tidak perlu diolah kembali. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hasil studi pustaka berupa naskah naskah, buku artikel jurnal, internet dan dapat diperlukan spesifik untuk kebutuhan peneliti.¹⁶

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penarikan sampel dalam hal ini informan adalah *Purposive Sampling*, dengan teknik ini pengambilan sampel sumber dilakukan dengan pertimbangan tertentu.¹⁷ Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat dan dapat dipercaya sehingga data

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.* hlm. 418.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 419.

yang diperoleh dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang peneliti angkat untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan.

Tabel 1.2 Daftar Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Ir. Muhammad Amir Fauzi	Ketua DPC PDI Perjuangan	Ketua pelaksana pendidikan politik
2	Maria Magdalena S.S	Anggota DPRD Kota Jambi sekaligus Anggota PDI-P	Wakil bidang kaderisasi dan ideologi
3	Sofian Tampubolon	Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Peserta Pendidikan Politik
4	Rusli Anum	Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Peserta Pendidikan Politik
5	Reza	Humas dan Media DPC PDI P Kota Jambi	Pembangun komunikasi dan citra yang baik antara partai dan publik/masyarakat
6	Dandi Sanjaya	Humas dan Media DPC PDI P Kota Jambi	Pembangun komunikasi dan citra yang baik antara partai dan masyarakat
7	Beni Supratno	Humas dan Media DPC PDI P Kota Jambi	Anggota partai yang ikut turun ke masyarakat untuk Pembangun Komunikasi dan citra yang baik antara partai dan masyarakat
8	Muhammad Kardi	Ketua RT 05	Merupakan ketua rukun tetangga sekaligus masyarakat yang pernah mengikuti kegiatan

			yang diadakan oleh PDI-P
9	Arif	Salah satu masyarakat yang bekerja di kantor pemerintahan	Masyarakat yang di anggap mampu memberikan pandangan tentang sistem politik
10	Parulian Saragih	Organisasi Pemuda Batak Bersatu	Masyarakat sekaligus organisasi yang ikut mengamati bagaimana pendidikan politik di Kota Jambi
11	Tuti	Tokoh Masyarakat pemilih PDI P	Masyarakat yang dalam pemilu sebelumnya memilih PDI P, untuk memahami bagaimana pendidikan politik mempengaruhi keputusan mereka.

Sumber : Olahan Penulis

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yaitu:¹⁸

a. Wawancara

Memperoleh data dengan cara peneliti menanyakan beberapa butir pertanyaan yang telah di susun kepada responden secara langsung yang bertujuan agar peneliti memperoleh informasi yang di sesuai dengan penelitian.¹⁹

¹⁸ Ibid hlm. 1

¹⁹ Irawan Sochartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosda 2011), hlm 67

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pemerolehan data atau informasi berupa buku, arsip/dokumen, artikel ilmiah, naskah, gambar, dan lain sebagainya sebagai laporan yang di sertai dengan penjelasan yang berkaitan dengan tema penelitian dan menunjang penelitian yang sedang di lakukan dan tentunya dapat membantu mendukung argumen-argumen peneliti.²⁰

1.7.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

a. Reduksi Data

Dalam reduksi data perlunya dilakukan pemilihan data yang relevan agar dapat menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian, karna data yang di dapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.

b. Penyajian Data

Dalam tahap penyajian data, maka data di sajikan dalam bentuk narsi deskriptif. Kemudian setelah data secara rinci di sajikan selanjutnya data tersebut di bahas.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan. Tujuannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara singkat di bahas.

²⁰ Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm 199

1.7.8 Keabsahan Data

Keabsahan data atau Triangulasi adalah prosedur untuk memverifikasi validitas data untuk dibandingkan dengan data lain, seperti metode, peneliti, referensi, dan konsep. Terdapat teknik triangulasi data dalam penelitian kualitatif dibagi berdasarkan data yang diperiksa.

1. Triangulasi sumber (Data Triangulation), yang berarti menggunakan berbagai sumber data dalam penelitian.
2. Triangulasi peneliti (Investigator Triangulation), yang berarti menggunakan beberapa peneliti dari berbagai disiplin ilmu dalam suatu penelitian.
3. Triangulasi metodologis (Methodological Triangulation), yang berarti menggunakan sejumlah perspektif metodologis dalam suatu penelitian.